

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan paparan gambaran umum kondisi daerah sebagaimana telah disajikan pada Bab II terdahulu dapat diidentifikasi potensi atau modal dasar sekaligus permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Dari sisi **modal dasar** Kota Magelang. Mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Magelang Tahun 2005-2025 dan juga draft dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang Tahun 2010-2030, potensi pengembangan wilayah Kota Magelang pada masa-masa mendatang adalah:

1. Kawasan Sidotopo sebagai pusat pelayanan pendidikan dan perdagangan jasa;
2. Kawasan Sukarno Hatta sebagai pusat pelayanan kegiatan transportasi dan perdagangan jasa;
3. Kawasan Kebonpolo sebagai pusat pelayanan kegiatan transportasi dan perdagangan;
4. Kawasan Alun-alun sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dan perkantoran;
5. Kawasan GOR Samapta sebagai pusat pelayanan rekreasi dan olahraga;
6. Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dan kesehatan;
7. Kawasan Objek Wisata Taman Kyai Langgeng sebagai kawasan pusat pelayanan rekreasi dan olahraga;

Kota Magelang termasuk dalam kategori Pelayanan Kegiatan Wilayah (PKW) yang harus mampu melayani beberapa kabupaten disekitarnya yang termasuk dalam PKW. Secara administratif Kota Magelang juga terletak di tengah-tengah Kabupaten Magelang serta berada **di persilangan lalu lintas ekonomi dan wisata** antara Semarang - Magelang - Yogyakarta dan Purworejo-Temanggung, sehingga Kota Magelang merupakan salah satu wilayah strategis di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah dengan penetapan menurut Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Purwomanggung (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, dan Kabupaten Magelang).

Kota Magelang termasuk dalam kawasan strategis Sub Regional PURWOMANGGUNG (Purworejo-Wonosobo–Magelang–Temanggung) yang

merupakan **kawasan andalan** Provinsi Jawa Tengah. Kawasan ini memiliki **potensi unggulan utama** meliputi industri besar, menengah dan kecil yang menghasilkan berbagai **produk: pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan jasa, termasuk perguruan tinggi dan simpul pariwisata.**

Dari tinjauan aspek mata pencaharian penduduk potensi yang terbesar berada jenis pekerjaan PNS/ABRI/pensiunan (27,35 %), kemudian diikuti pedagang (18,16 %), dan buruh lepas (17,48 %) serta buruh pabrik (11,38 %). Komposisi ini menunjukkan dominannya sektor jasa dibanding sektor pertanian dan manufaktur di Kota Magelang. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa serapan tenaga kerja lebih banyak disedot dari sektor *non tradeable* dibanding sektor yang *tradeable*.

Pendapatan perkapita. Tingkat rata-rata kesejahteraan penduduk Kota Magelang cukup tinggi, dengan PDRB perkapita sekitar 1,24 juta rupiah perbulan pada tahun 2009, dengan jumlah penduduk Kota Magelang paling rendah di Prov. Jateng, 118.316 orang (sumber: SP BPS 2010).

Investasi Pemerintah. Untuk menjaring calon investor, Pemkot Magelang menawarkan beberapa insentif, di antaranya, pelayanan perizinan satu pintu (one stop service), biaya perizinan usaha perdagangan nol rupiah, sebagian lahan investasi telah dikuasai/dimiliki pemerintah daerah, volume listrik memadai serta jaringan telepon. Tahun 2009 mempunyai gambaran jumlah pelanggan yang cukup besar yaitu pelanggan terbesar residential sebesar 9.711 SST, Bisnis 1.943 SST, dan departement sebanyak 163. Tingkat pelayanan umum per 100 penduduk di Kota Magelang mencapai 8,96 dengan total kapasitas terpasang sebanyak 11.817 SST. Kemudian air PAM pada tahun 2009 Kapasitas Produksi Yang Terpasang 1.174.272 M³, 453.037 L / dt

Bidang pariwisata. Jumlah Obyek Wisata di Kota Magelang cukup beragam baik yang berupa museum, bangunan tua, seni tradisional, taman kota dan *kid funks*, wisata ziarah, wisata alam, dan wisata kuliner yang didukung dengan keberadaan sejumlah hotel dan rumah penginapan.

Dari aspek pendidikan, Kota Magelang sudah memenuhi standar pelayanan minimal, banyak yg dari luar kota magelang. Prosentase yang masih perlu banyak dikejar adalah perguruan tinggi, meskipun ini di luar kewenangan pemerintah daerah, tetapi pemerintah daerah bisa mendongkrak secara tidak langsung melalui peningkatan pendapatan keluarga, dan mendorong kesadaran masyarakat untuk berusaha mendapatkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi

Bidang kesehatan. Sarana prasarana sudah mencukupi untuk melayani jumlah penduduk kota Magelang. Pada tahun 2009 Angka rawat jalan 134,92%,

untuk rawat inap 9,64 %, ini menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, semua rumah tangga juga telah memiliki akses ke fasilitas kesehatan terdekat dengan jangkauan kurang dari 5 km.

Pada sektor pangan, sudah mencukupi, tetapi sangat tergantung pasokan dari luar. Sebaliknya dari sudut kreativitas dan inovasi (krenova), Masyarakat Kota Magelang yang difasilitasi Pemerintah Kota Magelang selalu berhasil membuahkan prestasi yang membanggakan masuk 10 (sepuluh) besar sehingga mendapatkan penghargaan dari Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

Sementara itu, dari sisi **permasalahan kesejahteraan ekonomi**, tingkat pengangguran yang mencapai 14,95 % tergolong cukup tinggi. Begitu pula dalam hal jumlah penduduk miskin masih cukup besar tercatat sebanyak 18,76 %. Pada sektor pemukiman masih perlunya peningkatan kualitas prasarana dasar permukiman perkotaan, yang meliputi prasarana jalan lingkungan, prasarana drainase lingkungan, prasarana air bersih lingkungan, serta prasarana sanitasi lingkungan. Dalam penyediaannya, tidak terlepas dari karakteristik kawasan permukiman yang ada, yaitu kawasan permukiman padat di pusat-pusat perekonomian kota, kawasan permukiman di perbatasan dan kawasan permukiman baru. Sedangkan di sektor pangan, dari segi produksi pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan penduduk. indeks ketahanan pangan masyarakat Kota Magelang terbilang baik dan mapan, tergantung sekali dari luar

Tantangan masalah kesejahteraan adalah: (1) Jumlah penduduk miskin masih di atas persentase nasional; (2) Angka pengangguran masih di atas persentase nasional; (3) Sumber pemenuhan kebutuhan pangan tergantung dari luar; dan (4) Prasarana umum pemukiman; drainase, sanitasi, air bersih masih belum merata pemenuhannya.

Kondisi tersebut apabila dikaitkan dengan modal dasar dan posisi strategis Kota Magelang maka pokok pangkal untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar:

1. Penciptaan peluang kerja dan usaha di bidang perdagangan dan industri pengolahan dan jasa pendukung lainnya berbasis ekonomi kerakyatan untuk mengatasi pengangguran
2. Pengembangan pendidikan diarahkan pada pendidikan vokasional untuk menyiapkan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan lapangan kerja.
3. Pengembangan pelayanan kesehatan pada pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas
4. Pengembangan sarana prasarana lingkungan yang berdampak langsung untuk mengurangi resiko penyakit menular lingkungan, seperti sanitasi, air bersih.

Permasalahan lainnya yang muncul adalah dari **aspek pelayanan umum** yang dimanifestasikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Berbagai permasalahan urusan pemerintahan yang harus dihadapi dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan, menghadapi permasalahan :

- a. Kompetensi kelulusan siswa belum memenuhi kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan dunia usaha.
- b. Belum semua guru memenuhi kualifikasi standar minimal yang dipersyaratkan (D-4/S.1)
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas
- d. Manajemen dan tatakelola pendidikan belum efektif.

2. Urusan Kesehatan, menghadapi permasalahan :

- a. Angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular cenderung makin tinggi.
- b. Angka kesakitan demam berdarah cenderung makin tinggi, penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat, serta adanya ancaman pandemic flu burung.
- c. Penyakit-penyakit menular/ infeksi belum semua dapat diatasi, disisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti diabetes militus (DM), kardiovaskuler dan keganasan (kanker) meningkat.
- d. Kualitas lingkungan rendah, cakupan sanitasi dasar seperti cakupan air bersih, cakupan jamban keluarga, cakupan sarana pembuangan air limbah rendah, serta proporsi rumah tangga sehat rendah.
- e. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat masih rendah, kebiasaan cuci tangan dengan sabun, sebelum makan dan sesudah buang air besar (BAB) belum membudaya dan kebiasaan merokok di masyarakat masih tinggi.
- f. Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan belum optimal.

3. Urusan Pekerjaan Umum, menghadapi permasalahan :

- a. Masih adanya jalan dan jembatan yang rusak. Prasarana jalan dan jembatan senantiasa membutuhkan pemeliharaan dan peningkatan.
- b. Belum terpenuhinya semua kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku.

- c. Belum optimalnya fungsi prasarana dan sarana drainase pengendalian banjir pada musim penghujan
- d. Belum optimalnya kinerja prasarana dan sarana air bersih, sanitasi, dan persampahan terutama di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah.
- e. Rendahnya kualitas pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah diakibatkan tidak dipatuhinya NSPM dan rendahnya sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM.
- f. Belum berkembangnya jasa konstruksi karena kurangnya pembinaan dan pengawasan serta belum mantapnya mekanisme sertifikasi kompetensi.

4. Urusan Perumahan, menghadapi permasalahan :

- a. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang padat.
- b. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya.
- c. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung permukiman.
- d. Belum optimalnya upaya pemeliharaan terhadap sarana permukiman yang ada guna memperpanjang usia pakai sarana tersebut.
- e. Masih perlunya peningkatan kualitas prasarana dasar permukiman perkotaan, yang meliputi prasarana jalan lingkungan, prasarana drainase lingkungan, prasarana air bersih lingkungan, serta prasarana sanitasi lingkungan.
- f. Masih adanya pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni di Kota Magelang
- g. Lemahnya konsolidasi dan koordinasi komunitas perumahan dalam pengelolaan, pemeliharaan serta *sharing* pembangunan termasuk pembiayaan perumahan dan infrastrukturnya.

5. Urusan Penataan Ruang, menghadapi permasalahan :

- a. Kinerja Badan koordinasi Penataan Ruang daerah (BKPRD) belum optimal dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Belum tersusunnya Rencana Rinci Kawasan Strategis Kota maupun Rencana Detail Tata Ruang Kota (5 BWK)
- c. Masih lemahnya kepastian hukum (insentif dan desinsentif) terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
- d. Kurangnya pengembangan sarana informasi kepada masyarakat dibidang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

- e. Koordinasi dan kerjasama antar daerah belum optimal terutama daerah perbatasan.
- f. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.

6. Urusan **Perencanaan Pembangunan, menghadapi permasalahan :**

- a. Belum sinerginya proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik.
- b. Dokumen perencanaan yang disusun belum menekankan pada perencanaan yang terfokus dan langsung dapat dilaksanakan. Dokumen perencanaan yang disusun cenderung masih berupa wish list. Program dan kegiatan yang direncanakan masih belum disusun berdasarkan pada ketersediaan anggaran. Hal ini mengakibatkan perencanaan yang disusun tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan.
- c. Adanya ego atau kepentingan antarsektor yang seringkali dinyatakan sebagai kesulitan untuk melakukan koordinasi. Persoalan yang bersifat lintas sektor seringkali ditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya.
- d. Adanya anggapan atau asumsi bahwa dokumen perencanaan tersebut kurang mengakomodasi kebutuhan yang sebenarnya.
- e. Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah.
- f. Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarnya.
- g. Belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasinya pembangunan. Hal ini mengakibatkan dokumen perencanaan nasional akan menjadi dokumen legal formal yang bersifat statis, yang kurang optimal dalam mengawal dan mengakselerasi proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.
- h. Implementasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Keterkaitan proses perencanaan dengan penganggaran, yang mengarah kepada pengalokasian sumber daya yang lebih rasional dan strategis belum terwujud dan tidak sepenuhnya dirumuskan dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

- 7. Urusan **Perhubungan****, menghadapi permasalahan :
- a. Tingginya volume pergerakan/mobilitas terutama pada jam-jam sibuk yang tidak didukung oleh sarana prasarana jaringan jalan sehingga mengakibatkan kecenderungan peningkatan kecelakaan lalu lintas.
 - b. Pencemaran lingkungan akibat emisi gas buang oleh kendaraan bermotor.
 - c. Jaringan pelayanan angkutan penumpang sudah melebihi permintaan jasa angkutan sehingga rasio faktor muat/load factor terus menurun.
 - d. Rendahnya/kurangnya kualitas pelayanan/sarana prasarana yang diberikan bagi pengguna kendaraan umum.
 - e. Kurangnya disiplin pengguna jalan terhadap rambu-rambu dan aturan-aturan yang berlaku.
 - f. Adanya tumpang tindih kewenangan penanganan angkutan jalan dan angkutan kota oleh berbagai instansi pemerintah (pusat maupun daerah).
 - g. Kurangnya keterpaduan sistem jaringan jalan.
 - h. Lemahnya manajemen rekayasa lalu lintas.
- 8. Urusan **Lingkungan Hidup****, menghadapi permasalahan :
- a. Kurangnya lahan terbuka hijau (RTH) dan menurunnya kualitas RTH kota seperti taman-taman kota dan lainnya.
 - b. Masih rendahnya pelayanan dan pengelolaan pemakaman.
 - c. Rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan.
 - d. Belum optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan.
 - e. Terbatasnya lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.
 - f. Rendahnya pemahaman/ kepedulian masyarakat tentang pengelolaan sampah.
 - g. Peningkatan pencemaran air dan udara serta tingkat kebisingan.
 - h. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - i. Banyaknya kegiatan industri atau kegiatan usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan AMDAL, UKL-UPL , DPPL.
 - j. Banyaknya perusahaan/kegiatan industri yang belum memiliki instalasi pengolahan limbah (IPAL).
- 9. Urusan **Pertanahan****, menghadapi permasalahan :
- a. Sulitnya pengendalian penggunaan lahan. Antara lain disebabkan karena persepsi bahwa dengan kepemilikan lahan yang dimiliki oleh masyarakat

sendiri masyarakat berhak mengelola/menggunakannya sesuai dengan keinginan sendiri..

- b. Banyaknya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, utamanya pada sektor perumahan/properti. Peruntukan penggunaan tanah sawah untuk lahan berkelanjutan tidak dapat berjalan.
- c. Terbatasnya ketersediaan lahan yang akan dijadikan dan ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan sebagai penopang ketersediaan pangan baik tingkat propinsi maupun nasional.
- d. Penyediaan tanah untuk pemukiman atau perumahan belum memenuhi kebutuhan, sehingga berkembang rumah kumuh di perkotaan dengan intensitas yang tidak terkendali.
- e. Belum teridentifikasi tanah negara/tanah terlantar secara detail (data base) belum akurat
- f. Belum adanya insentif dan desinsentif dibidang pertanahan.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, menghadapi permasalahan :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan.
- b. Masih kurangnya pemahaman aparat yang terlibat dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil akan prosedur dan peraturan perundangan yang mendasari.
- c. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait.
- d. Belum adanya sarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menghadapi permasalahan :

- a. Masih perlunya peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat sebagai dampak dari nilai sosial dan budaya masyarakat Jawa pada umumnya
- b. Masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik
- c. Masih kurangnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak
- d. Lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- e. Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- f. Sistem kesejahteraan dan perlindungan anak masih belum memadai

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, menghadapi permasalahan :

- a. Belum optimalnya pelayanan KB dan kemudahan akses bagi semua PUS
- b. Kurang lengkapnya sarana/prasarana dan rendahnya kapasitas aparatur dalam pelayanan KB
- c. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penciptaan keluarga sejahtera dan kesadaran akan arti penting penguatan keluarga sebagai basis ketahanan sosial masyarakat
- d. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan KB-KS
- e. Belum optimalnya penyelenggaraan BKB-Posyandu-PAUD

13. Urusan Sosial, menghadapi permasalahan :

- a. Penggangguran memunculkan perilaku sosial yang menyimpang
- b. Masih terdapatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial
- c. Masih rendahnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS
- d. Belum optimalnya kemudahan akses masyarakat akan pelayanan sosial
- e. Masih rendahnya jaminan perlindungan dan bantuan sosial

14. Urusan Ketenagakerjaan, menghadapi permasalahan :

- a. Sempitnya kesempatan kerja yang disebabkan oleh : a) ketidakseimbangan antara kesempatan kerja yang ada dengan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan; b) Penyerapan angkatan kerja yang ada tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, sehingga jumlah pengangguran bertambah.
- b. Peluang kerja di kota Magelang yang relatif belum bisa menampung tenaga kerja bagi pencari pekerjaan
- c. Hambatan budaya (feodalisme), masyarakat cenderung kepada pekerjaan kantoran (pegawai negeri, dll) sebagai pekerjaan prestisius, sehingga mematikan kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa pemerintahan.
- d. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh: a) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; b) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; c) Ketidaksiharian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki; d) Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai.

- e. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang diakibatkan pemutusan hubungan kerja maupun angkatan kerja baru.
- f. Kekurangpuasan pekerja terhadap besaran Upah Minimum Kota (UMK).
- g. Belum optimalnya perlindungan dan pengembangan tenaga kerja, yang disebabkan oleh kurang berfungsinya lembaga ketenagakerjaan dan lemahnya pengawasan.
- h. Inkonsistensi implementasi hukum perburuhan oleh perusahaan, seperti pelaksanaan UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)
- i. Belum tersedianya *database* ketenagakerjaan.

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, menghadapi permasalahan :

- a. Rendahnya manajemen usaha, seringkali ada yang belum melakukan pemisahan antara bisnis/usaha dan rumah tangga.
- b. Belum memiliki legitimasi tempat usaha.
- c. Belum memiliki legitimasi hukum atas asset, sehingga terjadi kesulitan dalam mengakses kredit perbankan.
- d. Rendahnya kualitas SDM, sehingga pola kemitraan sulit diterapkan baik di bidang produksi, pemasaran maupun teknologi.
- e. Rendahnya ketersediaan skim permodalan secara khusus bagi UKM.

16. Urusan Penanaman Modal, menghadapi permasalahan :

- a. Kurangnya promosi terhadap investor sehingga investasi yang masuk tidak optimal ;
- b. Kurang optimalnya dukungan terhadap potensi investasi karena kekurangsiapan sumberdaya dan sarana prasarana dalam menarik investor serta karena terbatasnya lahan dan infrastruktur.

17. Urusan Kebudayaan, menghadapi permasalahan :

- a. Budaya daerah belum banyak mendapatkan apresiasi dari masyarakat.
- b. Lunturnya nilai-nilai etika, moral, budaya dan keagamaan pada masyarakat disebabkan oleh pengaruh negatif globalisasi yakni budaya asing terhadap budaya masyarakat Indonesia.
- c. Belum optimalnya pembinaan/pendidikan moral, etika dan budi pekerti bagi para remaja dan siswa sekolah.
- d. Belum optimalnya pelestarian sejarah dan permuseuman.

- e. Belum optimalnya perlindungan dan pelestarian terhadap kekayaan budaya nasional/daerah, sehingga sangat rentan untuk diambil alih/diakui oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- f. Belum optimalnya promosi budaya daerah, belum efektifnya system inventarisasi dan penyajian informasi mengenai jenis dan ragam budaya daerah Kota Magelang.
- g. Kesempatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam mengamalkan kepercayaannya masih mengalami banyak hambatan-hambatan sosial dan budaya.

18. Urusan **Kepemudaan dan Olah Raga, menghadapi permasalahan :**

- a. Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah yang diantaranya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan, daya tangkal, kepedulian terhadap masalah-masalah pembangunan, keterbatasan akses dan kemitraan.
- b. Masih rendahnya peran kelembagaan/organisasi kepemudaan dalam pembangunan kepemudaan;
- c. Belum optimalnya prestasi dan pemasyarakatan olahraga disebabkan oleh lemahnya pembibitan, pembinaan, pemanduan dan pemasyarakatan olahraga serta tidak adanya penelitian dan pengembangan keolahragaan.
- d. Rendahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan/organisasi olah raga;
- e. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga.

19. Urusan **Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, menghadapi permasalahan:**

- a. Masih terdapatnya berbagai penyakit masyarakat
- b. Masih adanya ancaman terorisme, konflik SARA (baik vertikal maupun horizontal) dan gerakan yang bersifat radikalisme yang kadang bersifat laten dengan daya destruktif yang tinggi
- c. Masih perlunya pembinaan petugas penanggulangan bencana alam

20. Urusan **Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, menghadapi permasalahan :**

- a. Belum sinerginya peraturan perundangan yang yang diterbitkan pemerintahan pusat dan daerah, yang berakibat pada terjadinya

- tumpang tindih, perbedaan persepsi dan kekosongan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelayanan publik yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas, kompetensi dan profesionalitas SDM aparatur berikut sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan informatika (TI) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
 - d. Belum optimalnya kerja sama antar daerah, daerah dengan swasta dan daerah dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
 - e. Belum sebandingnya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pusat dan pendapatan asli daerah dengan pembiayaan yang harus di keluarkan daerah;
 - f. Belum optimalnya lembaga perwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan peran dan fungsi politik;
 - g. Kurang tuntasnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai;
 - h. Banyaknya hasil temuan pemeriksaan interen yang mencerminkan ketidakdisiplinan pengelolaan anggaran;
 - i. Rendahnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan (litbang) yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di pemerintah daerah;

21. Urusan **Ketahanan Pangan, menghadapi permasalahan :**

- a. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau oleh masyarakat.
- b. Produksi dan kapasitas produksi pangan lokal belum mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduk
- c. Belum optimalnya intensifikasi lahan ada bidang pertanian sawah
- d. Belum optimalnya kinerja sektor untuk pengembangan intensifikasi maupun diversifikasi usaha on farm dalam mendukung ketahanan pangan.
- e. Rendahnya pendapatan masyarakat dari sektor pangan.
- f. Belum optimalnya peran Kota Magelang sebagai fasilitator perdagangan dengan membuka pusat pergudangan dan transit area bagi distribusi komoditas.

- g. Rendahnya ketrampilan petani melalui program pelatihan sebagai upaya mendukung intensifikasi lahan dan peningkatan produksi.

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, menghadapi permasalahan :

- a. Masih perlunya pembangunan kapasitas sistem, baik sistem pemerintahan maupun sistem yang ada di masyarakat
- b. Masih perlunya peningkatan sumber daya manusia
- c. Masih rendahnya peran aktif dan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan teknologi tepat guna untuk mengembangkan keunggulan komparatif dan kompetitif
- d. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Masih terdapat jumlah penduduk dan rumah tangga miskin

23. Urusan Statistik, menghadapi permasalahan :

- a. Belum tersedianya data statistik yang valid dan akurat sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, hal ini dikarenakan:
 - Kurangnya ketersediaan data dasar yang akurat dan tepat waktu
 - Belum optimalnya kerjasama antar SKPD dalam pengelolaan dan penyediaan data;
 - Belum tersedianya sistem informasi data yang baik;
 - Kurangnya tenaga profesional yang khusus menangani masalah pendataan di tiap unit kerja.
 - Data dan referensi yang digunakan tidak konsisten
 - Duplikasi dalam pengumpulan dan pengolahan data
 - Belum tingginya kesadaran aparat akan pentingnya data.

24. Urusan Kearsipan, menghadapi permasalahan :

- a. Belum optimalnya sistem kearsipan yang disebabkan oleh kurangnya SDM dan sarana dan prasarana kearsipan serta rendahnya perhatian dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem kearsipan;
- b. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara banyaknya arsip dengan jumlah SDM yang menangani;
- c. Kurangnya khasanah arsip yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip;

- d. Belum optimalnya pelayanan informasi kearsipan daerah yang disebabkan oleh belum tersedianya sistem informasi kearsipan yang memadai.

25. Urusan Komunikasi dan Informatika, menghadapi permasalahan :

- a. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sistem informatika yang memadai untuk mendukung efisiensi pelayanan publik dan transparansi.
- b. Belum optimalnya jangkauan dan akses komunikasi informasi yang disebabkan masih terbatasnya sarana dan prasarana serta pengembangan komunikasi informasi.
- c. Belum optimalnya kerjasama di bidang komunikasi dan informasi antara pemerintah dan mass media yang disebabkan oleh masih kurangnya publikasi pemerintah daerah di berbagai mass media.
- d. Belum optimalnya penelitian di bidang komunikasi dan informasi yang disebabkan oleh belum terintegrasinya kegiatan penelitian dalam suatu jaringan penelitian yang efektif.
- e. Masih lemah dan kurangnya kualitas SDM di bidang komunikasi dan informasi yang disebabkan oleh kesenjangan antara kemajuan IPTEK yang sangat cepat dengan penguasaan teknologi oleh aparatur bidang komunikasi dan informasi.
- f. Masih kurangnya pemahaman tentang aturan-aturan baru yang terkait di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

26. Urusan Perpustakaan, menghadapi permasalahan :

- a. Kurangnya minat baca di dalam masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat;
- b. Rendahnya kualitas pelayanan perpustakaan (perpustakaan daerah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus/instansi, perpustakaan kelurahan, perpustakaan rumah ibadah, dan perpustakaan sekolah).
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam.

27. Urusan Pertanian, menghadapi permasalahan :

- a. Penurunan luas lahan pertanian setiap tahun dan diikuti dengan menurunnya beberapa produksi komoditas sub sektor pertanian;

- b. Sedikitnya petani dan kecilnya luas kepemilikan lahan sebagian besar petani (luas garapan kurang lebih 0.3 ha), sehingga skala usaha yang digunakan untuk pertanian kurang ekonomis;
- c. Posisi tawar yang rendah bagi petani penggarap terhadap petani pemilik lahan. Apabila panen maka keuntungan dibagi dengan pemilik lahan (50:50), namun jika gagal maka harus kerugian ditanggung petani penggarap sendiri;
- d. Kurangnya kesadaran petani terhadap teknologi baru (TTG);
- e. Harga dan penyaluran pupuk bersubsidi belum optimal;
- f. Masih adanya serangan hama tikus dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- g. Saluran irigasi yang belum mencukupi;
- h. Pengaruh perubahan iklim;
- i. Terbatasnya SDM yang berpengalaman pada kegiatan penelitian;
- j. Terbatasnya tenaga teknis lapangan yang handal/ahli;
- k. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan, kurang optimalnya kinerja pelayanan birokrasi pertanian;
- l. Belum optimalnya pemanfaatan sapras pertanian dan peternakan yang tersedia;
- m. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani, penyuluh dan belum berjalannya diversifikasi usaha tani.
- n. Belum optimalnya intensifikasi sawah guna meningkatkan produksi.
- o. Masih adanya ancaman bahaya rabies dan avian influenza.
- p. Belum optimalnya peran RPH dan laboratorium Kesmavet dengan sarana prasarana yang belum sesuai standar.
- q. Lemahnya koordinasi lintas sektor dan manajemen budidaya ternak.
- r. Kurang memadainya sarana prasarana inseminasi buatan dan tenaga teknis lapangan yang handal.

28. Urusan Kehutanan, menghadapi permasalahan :

- a. Belum efektifnya gerakan moral secara nasional untuk menjaga kelestarian hutan dan lahan guna mendukung keberlanjutan kehidupan.
- b. Belum optimalnya upaya melestarikan 71,2 hektar kawasan lindung Gunung Tidar dan kawasan-kawasan lainnya yang dalam kondisi kosong (tidak/belum ditanami) serta lahan-lahan kosong di lingkungan kantor, rumah sakit, lingkungan TNI, sekolah dan pekarangan rumah.
- c. Belum optimalnya kesadaran untuk gemar menanam dan memelihara pohon

d. Masih kurangnya persentasi kawasan hijau Kota Magelang.

29. Urusan Pariwisata, menghadapi permasalahan :

- a. Sumbangan sektor pariwisata terhadap PAD belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya promosi yang dilakukan, baik di dalam maupun luar negeri, sehingga jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran belanja wisatawan masih relatif kecil.
- b. Daya saing dan daya jual destinasi pariwisata masih lemah. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kualitas produk dan jasa pariwisata, kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan obyek dan daya tarik wisata, masih rendahnya kualitas SDM pengelola obyek dan daya tarik wisata, pramuwisata maupun para pelaku pariwisata lainnya.
- c. Kemitraan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha pariwisata dan masyarakat masih belum terjalin dengan baik. Hal ini disebabkan oleh lemahnya jejaring, kerjasama, koordinasi dan keterpaduan dalam pengembangan pariwisata serta rendahnya partisipasi masyarakat.

30. Urusan Kelautan dan Perikanan, menghadapi permasalahan :

- a. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia di bidang perikanan merupakan isu utama di sektor perikanan Kota Magelang.
- b. Produksi ikan di Kota Magelang meskipun setiap tahun selalu mengalami kenaikan tetapi masih belum juga bisa mencukupi kebutuhan akan ikan di dalam Kota Magelang, sehingga harus didatangkan dari luar kota Magelang.
- c. Belum optimalnya pengembangan teknologi pembenihan dan pembesaran berbagai komoditas perikanan, khususnya sistem budidaya lahan sempit
- d. Sarana dan prasarana perikanan yang tersedia seperti Balai Benih Ikan (BBI), Balai Benih Udang Galah (BBUG), pasar ikan konsumsi dan sentra pengolahan ikan, pemanfaatannya belum optimal, yang disebabkan: a) Keterbatasan lahan secara ekonomis belum tercapai, b) lokasi BBUG Kota Magelang yang jauh dari air laut, c) sistem pengairan yang bersumber dari saluran irigasi tidak tersedia sepanjang tahun, d) sarana dan prasarana masih kurang memadai, e) status kelembagaan dan tupoksi yang belum jelas, f) penyediaan dana operasional yang belum mencukupi, g) struktur organisasi dan system pengelolaan yang belum mantap, h) dukungan tenaga pelaksana belum

optimal dan keberadaannya yang belum banyak dikenal oleh masyarakat.

- e. Belum optimalnya perluasan pasar untuk benih dan produksi perikanan lain baik lokal maupun luar daerah.

31. Urusan Perdagangan, menghadapi permasalahan :

- a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta belum berkembangnya kerjasama perdagangan internasional;
- b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- d. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah.

32. Urusan Industri, menghadapi permasalahan :

- a. Masih rendahnya tingkat profesionalisme aparatur dan SDM Industri Kecil, Menengah ;
- b. Rendahnya daya saing produk IKM dalam menghadapi dampak globalisasi ;
- c. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya ;
- d. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk ;
- e. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM ;
- f. Terbatasnya produk berorientasi ekspor.

33. Urusan Ketransmigrasian, menghadapi permasalahan :

- a. Masih rendahnya kualitas ketrampilan/keahlian calon transmigran.
- b. Berkurangnya minat masyarakat Kota Magelang untuk bertransmigrasi.

4.2. Dinamika Lingkungan Strategis

Kajian isu strategis mendasarkan pada situasi dan kondisi lingkungan strategis. Lingkungan strategis adalah lingkungan yang dapat mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan pembangunan. Dinamika yang terjadi di dunia internasional, nasional, regional maupun lokal penting dipahami dan disikapi untuk tindakan kebijakan prefentif maupun kuratif. Kemajuan global makin meningkatkan keterkaitan pengaruh dunia internasional, terhadap kondisi

nasional, regional maupun lokal. Hubungan antar manusia dengan segala kepentingan, aktivitas dan akibat atau kejadian-kejadiannya, melahirkan isu-isu dan permasalahan strategis baik positif maupun negatif.

1. Lingkungan Internasional

a. Globalisasi perdagangan dan jasa

Perdagangan bebas memperketat persaingan sektor usaha antar negara, sehingga dibutuhkan kualitas SDM (tenaga kerja) yang mampu menghasilkan produk-produk ekspor (barang dan jasa) yang unggul dan berdaya saing. Kekalahan daya saing akan berakibat pada penurunan ekspor serta kegagalan program penempatan tenaga kerja atau pengurangan pengangguran.

b. Fluktuasi harga dan kurs mata uang

Produktivitas yang tidak sebanding dengan tingginya konsumsi mencerminkan pola hidup konsumtif yang harus dikurangi. Besarnya konsumsi mempengaruhi daya saing rupiah terhadap mata uang internasional dan dalam keterkaitan dengan perdagangan internasional akan terjadi ketimpangan (defisit) Neraca Pembayaran. Fluktuasi negatif ataupun penurunan nilai rupiah yang signifikan mengakibatkan instabilitas APBN yang selanjutnya akan mengurangi besaran dana perimbangan (DAU, DAK dan lainnya).

c. Degradasi lingkungan

Pemanasan global berdampak pada terjadinya pencairan es/salju yang menambah kenaikan permukaan air laut (rob). Akibat lainnya adalah terjadinya anomali musim, bencana alam dan kerusakan alam yang menurunkan produktivitas pertanian. Krisis pangan dunia mesti disikapi dengan peningkatan swasembada pangan guna terpenuhinya kebutuhan pangan nasional.

d. Komitmen Internasional

Kesepakatan antar negara khususnya yang telah ditandatangani (disepakati) oleh Pemerintah Indonesia perlu didukung oleh seluruh masyarakat (Pemerintah Daerah). Komitmen internasional tersebut diantaranya adalah *Millenium Development Goals (MDG's)* tentang paradigma pembangunan global, Protokol Kyoto tentang pengurangan emisi gas rumah kaca, *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)* tentang pembangunan dan pemberdayaan perempuan, *Hyogo Framework* tentang peredaman bencana, *Ecolabelling* atau sertifikasi produk dan sebagainya.

Deklarasi MDGs 2015 yang ditandatangani pada tanggal 8 September 2000 menyetujui agar semua negara melaksanakan:

1. Pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim

Target untuk 2015: Mengurangi setengah dari penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1 dolar AS sehari dan mengalami kelaparan.

2. Pemerataan pendidikan dasar

Target untuk 2015: Memastikan bahwa setiap anak, baik laki-laki dan perempuan mendapatkan dan menyelesaikan tahap pendidikan dasar.

3. Mendukung adanya persamaan jender dan pemberdayaan perempuan

Target 2005 dan 2015: Mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015.

4. Mengurangi tingkat kematian anak

Target untuk 2015: Mengurangi dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun.

5. Meningkatkan kesehatan ibu

Target untuk 2015: Mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan

6. Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya

Target untuk 2015: Menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran AIDS, malaria dan penyakit berat lainnya.

7. Menjamin daya dukung lingkungan hidup

Target:

- Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan
- Pada tahun 2015 mendatang diharapkan mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat
- Pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh

8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Target:

- Mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berdasarkan aturan, dapat diterka dan tidak ada diskriminasi. Termasuk komitmen terhadap pemerintahan yang baik, pembangunan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional.

- Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara kurang berkembang, dan kebutuhan khusus dari negara-negara terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil. Ini termasuk pembebasan-tarif dan kuota untuk ekspor mereka; meningkatkan pembebasan hutang untuk negara miskin yang berhutang besar; pembatalan hutang bilateral resmi; dan menambah bantuan pembangunan resmi untuk negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan.
- Secara komprehensif mengusahakan persetujuan mengenai masalah utang negara-negara berkembang.
- Menghadapi secara komprehensif dengan negara berkembang dengan masalah hutang melalui pertimbangan nasional dan internasional untuk membuat hutang lebih dapat ditanggung dalam jangka panjang.
- Mengembangkan usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda
- Dalam kerja sama dengan pihak "pharmaceutical", menyediakan akses obat penting yang terjangkau di negara berkembang
- Dalam kerjasama dengan pihak swasta, membangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologi-teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

2. Lingkungan Nasional

a. Kemiskinan dan pengangguran

Jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan kriteria MDG's yaitu yang berpenghasilan kurang dari 1\$ US lebih kurang sebanyak 16,5 juta jiwa atau 7,5%.

b. Krisis energi

Sumber energi yang digunakan saat ini sebagian besar bersumber dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Keterbatasan energi fosil memicu terjadinya krisis energi yang lebih lanjut akan berpengaruh pada produktivitas masyarakat utamanya dunia usaha. Penggunaan energi alternatif perlu diupayakan guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

c. Tuntutan pemerintahan yang bersih dan profesional

Kenyataan yang melekat beberapa periode terdahulu hingga saat ini adalah banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme yang merambah di semua tingkatan aparatur. Selain itu birokrasi yang dinilai kurang profesional tidak sejalan dengan kebutuhan dan pengetahuan masyarakat yang terus berkembang. Kebijakan Reformasi Birokrasi dilakukan secara menyeluruh dari

tatanan kelembagaan, manajemen, pengembangan SDM, penegakan hukum demokrasi dan lain-lain dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang makin berkualitas.

d. Bencana alam

Degradasi lingkungan sebagaimana halnya masalah internasional strategis juga dirasakan secara nasional. Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi lebih besar akan intensitas terjadinya bencana alam berupa tsunami, gempa, letusan gunung berapi, banjir dan tanah longsor. Selain itu kebakaran hutan juga sering terjadi sebagai negara yang cukup kaya akan hutan dan perkebunan. Tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh jajaran pemerintah hingga masyarakat.

e. Kemampuan keuangan negara

Pembangunan menyeluruh membutuhkan dana pembiayaan yang besar, sementara kemampuan keuangan negara sangat terbatas sehingga negara masih terbelit hutang luar negeri yang cukup besar pula. Setiap daerah harus berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah (tidak hanya bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat) dengan cara meningkatkan penggalian pendapatan asli daerah dan investasi. Dalam RPJM 2010-2011 disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional selama ini berkisar 6%, padahal pembangunan yang inklusif membutuhkan pertumbuhan ekonomi diatas 6,5% per tahun. Pertumbuhan ekonomi ini dapat terwujud manakala terjadi peningkatan produktivitas dunia usaha yang signifikan terhadap ekspor.

Di sisi lain proporsi belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai dan belanja tidak langsung, harus diimbangi dengan efisiensi dan efektivitas tinggi agar dana yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya.

f. Stabilitas keamanan dan ketentraman

Salah satu dampak buruk kemajuan iptek adalah makin canggihnya kejahatan, diawali dari tumbuhnya keinginan dan ketidakpuasan, persaingan dan kecemburuan sosial sehingga mendorong orang untuk berperilaku melawan, merugikan dan meresahkan.

g. Hambatan perdagangan antar daerah

Hambatan perdagangan antar daerah biasanya berkaitan dengan perijinan, transportasi, komunikasi, informasi dan sarana prasarana pendukung. Hal yang dirasakan oleh dunia usaha khususnya usaha kecil dan menengah adalah kurangnya akses ke pasar di luar daerah maupun ekspor.

h. Keadilan dan kesetaraan gender

Indikator pembangunan gender secara resmi adalah *Gender-related Development Index (GDI)* dan *Gender Empowerment Measurement (GEM)*. Dua indikator tersebut menghendaki adanya peningkatan peran dan kesempatan bagi perempuan sebagaimana peran dan kesempatan yang dimiliki laki-laki. Kesempatan tersebut adalah kesempatan dalam berusaha, pendidikan dan lain-lain serta dalam menduduki jabatan/posisi strategis tertentu.

i. Perlindungan dan kesejahteraan anak

Tujuan dari isu ini adalah untuk menjamin dan melindungi anak akan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi. Kasus gizi buruk, partisipasi sekolah, putus sekolah, kekerasan terhadap anak, pekerja anak, anak jalanan dan lain-lain adalah fakta yang menunjukkan belum terpenuhinya perlindungan dan kesejahteraan anak.

j. Daya saing teknologi dan industri

Dominasi ekspor Indonesia adalah ekspor bahan mentah yang bersumber dari kekayaan alam yang belum diolah, sehingga memiliki nilai ekonomis yang rendah. Penyebabnya adalah kurangnya kemampuan iptek dalam mengolahnya menjadi barang setengah jadi maupun produk akhir serta kurangnya kemampuan iptek dalam menciptakan dan membuat produk yang berkualitas. Budaya iptek yang kreatif dan inovatif harus difasilitasi.

Selain itu kebanggaan terhadap produk dalam negeri kurang tertanam dalam diri warga negara Indonesia, *image* yang berkembang adalah bahwa produk dalam negeri selalu lebih jelek daripada produk luar negeri. Pencintaan terhadap produk tradisional (batik, dll) merupakan satu bentuk *local genius* yang baik untuk dikembangkan, khususnya di dalam negeri dan sebaiknya dipromosikan/dipasarkan ke luar negeri.

3. Lingkungan Regional (Jawa Tengah)

Kondisi nasional sebagian adalah cermin dari kondisi regional yang memiliki kesamaan kasus dan masalah. Isu strategis dalam pembangunan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Jawa Tengah periode 2008-2013 secara ringkas sebagai berikut :

a. Tingginya jumlah penduduk miskin

Upaya pengurangan kemiskinan sangat tidak mudah, terlihat bahwa selama lima tahun (2003-2008) jumlah penduduk miskin Jawa Tengah hanya berkurang 1,29%.

- b. Tingginya jumlah penganggur
Jumlah penganggur Jawa Tengah dalam lima tahun telah meningkat sebanyak 49% yang disebabkan meningkatnya jumlah angkatan kerja dan terjadinya PHK.
- c. Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian
Alih fungsi lahan pertanian 2% per tahun berdampak pada berkurangnya luas areal produktif dan ketersediaan pangan. Hal ini sejalan dengan kemajuan peradaban yang merubah pola kerja sektor primer ke sekunder dan tersier.
- d. Belum meratanya pelayanan kesehatan dasar
Keterbatasan anggaran daerah belum mampu menjangkau seluruh keluarga miskin akan kebutuhan pelayanan kesehatan.
- e. Rendahnya realisasi penanaman modal
Realisasi PMDN tahun 2006 sebesar 5.070,31 trilyun turun menjadi 348,93 milyar rupiah di tahun 2007, PMA turun dari 385,79 milyar di tahun 2006 menjadi 106,63 milyar rupiah di tahun 2007.
- f. Rendahnya akses usaha kecil dan mikro terhadap permodalan dan pasar ekspor
UMKM adalah basis perekonomian yang cukup tangguh di Jawa Tengah, namun beberapa diantaranya mengalami kesulitan memperoleh akses permodalan dan kesulitan menembus pasar ekspor yang disebabkan kualitas produk kalah bersaing dan keterbatasan transportasi/distribusi.
- g. Belum optimalnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang amanah (*Good Governance*)
Reformasi tata pemerintahan tidak hanya perlu dilakukan oleh negara saja (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), tetapi juga dunia usaha/swasta (*corporates*) dan masyarakat luas (*civil society*) yang mampu mendukung terwujudnya *Good Governance*.
- h. Bencana alam
Dengan disusunnya Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana diharapkan resiko bencana dapat diantisipasi sebelumnya (mitigasi bencana).
- i. Masalah penegakan hukum
Beberapa kasus korupsi belum ditindaklanjuti.
- j. Belum terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender
Indeks pemberdayaan gender (IDG/GEM) Jawa Tengah menduduki ranking 11 dari 33 provinsi di Indonesia.

4. RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025

Pembangunan jangka menengah memiliki tanggung jawab atas tahapan perwujudan cita-cita besar pembangunan jangka panjang. Dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka panjang (RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025) teridentifikasi berbagai permasalahan yang harus diatasi. Sasaran jangka panjang dan permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Sasaran mewujudkan Kota Magelang sebagai pusat pelayanan jasa yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan fasilitas yang memadai, menghadapi permasalahan:

a. Belum optimalnya pemanfaatan area-area strategis.

Kawasan sentra ekonomi baru yang telah direncanakan sejak periode jangka menengah pertama belum menunjukkan perkembangan sebagaimana yang diinginkan. Hal tersebut terkait dengan belum adanya investor yang sesuai dengan peruntukannya.

b. Kurangnya akses informasi pembangunan.

Penyebaran informasi efektif dirasa masih kurang dapat memenuhi kebutuhan pencari informasi. Akses informasi dan komunikasi timbal balik berikut pelayanan lainnya perlu dikembangkan melalui media elektronik, *website* maupun media massa, dimana yang ada selama ini sangat pasif, kurang dinamis dan intensif.

c. Keterbatasan anggaran

Paradigma otonomi daerah memacu setiap daerah untuk berlomba mengembangkan daerahnya. Perkembangan pesat sarana prasarana jasa daerah sekitar harus ditandingi dengan kualitas sarana prasarana beserta pelayanan yang lebih unggul. Perwujudan hal tersebut membutuhkan anggaran yang besar.

d. Kualitas angkatan kerja yang belum siap pakai.

Tingkat pengangguran terbuka yang didominasi lulusan SLTA dan perguruan tinggi mengindikasikan bahwa pendidikan yang diperoleh belum berorientasi pada dunia usaha. Lapangan kerja yang ada akan diambil oleh tenaga kerja dari luar daerah yang memiliki kualitas lebih baik.

2. Sasaran mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab, menghadapi permasalahan :

- a. Berkembangnya sifat individualis, hedonis dan apatis.
Kemajuan zaman telah banyak merubah pola pikir sebagian besar masyarakat menjadi materialis dan mengabaikan prinsip memberi manfaat pada orang banyak. Untuk meraih tujuan keduniawiannya tidak jarang menghalalkan segala cara dengan melakukan langkah-langkah yang tidak terpuji. Peran lembaga keagamaan dan kemasyarakatan mesti ditingkatkan dalam rangka pembinaan akhlak dan budi pekerti.
- b. Maraknya berita dan tayangan yang tidak mendidik.
Tayangan dan informasi negatif biasanya memiliki daya tarik lebih ketimbang yang positif. Masyarakat sangat mudah terprovokasi oleh hal tersebut, yang tanpa disadari merugikan dirinya maupun pihak-pihak lain. Program sosialisasi dan komunikasi intensif dengan masyarakat, wartawan/media massa dan tokoh berpengaruh perlu dibangun.
- c. Berkurangnya nilai-nilai kearifan lokal.
Rasa bangga terhadap bangsa sendiri melahirkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas apa yang dimiliki. Paradigma swadaya, swasembada, swakarsa, swakarya secara signifikan bergeser pada budaya mengharap bantuan, lebih suka membeli (impor) daripada membuat (produk lokal). Dibutuhkan keteladanan para pemimpin, kebersamaan seluruh komponen masyarakat dan dorongan dari pihak-pihak yang memiliki kemampuan lebih.

3. Sasaran mewujudkan daya saing daerah melalui pengelolaan pembangunan Kota Magelang yang efisien, efektif, profesional, berwawasan lingkungan, mengembangkan potensi daerah secara kreatif, inovatif, didukung oleh penguasaan iptek dan sumber daya manusia yang berkualitas, menghadapi permasalahan:

- a. Kurangnya payung hukum pelayanan publik dan inovasi pelayanan yang diunggulkan.
Keunggulan daya saing diperoleh dari persepsi positif publik atas layanan yang memuaskan. Proses dan produk pelayanan haruslah legal dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga aman dari kasus maupun dampak negatif lainnya. Daya saing daerah akan tercapai jika memiliki spesifikasi dan keunggulan dari daerah lainnya.
- b. Masih banyaknya bangunan tanpa izin resmi, pelanggaran tata ruang dan perizinan, hunian padat.
- c. Lalu lintas yang semakin ramai.
- d. Masih adanya rumah dan permukiman kumuh.

- e. Rendahnya prestasi pemuda, olahraga dan senibudaya.
- f. Kurangnya fasilitasi aktivitas (efent) pengembangan potensi.
- g. Rendahnya kualitas hasil karya teknologi masyarakat.
- h. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan iptek dalam berbagai aspek.

4. Sasaran mewujudkan perekonomian Kota Magelang yang bertumpu pada penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat, menghadapi permasalahan :

- a. Belum terealisasinya pembangunan Pasar Rejowinangun.
- b. Lemahnya daya saing UMKM dan peran koperasi.
- c. Lemahnya permodalan, pemanfaatan iptek dan kemampuan kewirausahaan.
- d. Kurangnya fasilitasi, kemitraan dan penjaminan pengembangan UMKM.
- e. Belum terbangunnya kerjasama antar pemerintah daerah di bidang ekonomi.
- f. Masuknya pelaku usaha dari luar daerah yang memperketat persaingan dan meningkatkan terjadinya pelanggaran area usaha.
- g. Keterbatasan lapangan kerja yang ada dan potensi usaha yang belum tergali.
- h. Lemahnya sistem kelembagaan ekonomi yang efektif.
- i. Minimnya produk unggulan yang berorientasi ekspor.

5. Sasaran mewujudkan *good governance* dan *clean government* dengan melibatkan dunia usaha, masyarakat madani (*civil society*) dan media massa untuk menuju kehidupan masyarakat Kota Magelang agamis, damai, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran, menghadapi permasalahan :

- a. Lemahnya manajemen aparatur dalam hal penempatan, pembinaan, pengembangan potensi dan penerapan *reward and punishment*.
- b. Belum tercapainya kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efisien dan efektif, didukung dengan analisa yang memadai.
- c. Masih ditemukannya berbagai kasus yang melibatkan aparatur.
- d. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan masih bersifat normatif kurang terukur.

- e. Sistem administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban yang kurang praktis, sinergis dan saling mendukung.
- f. Kurang optimalnya keterlibatan (kerjasama) akademisi, pengusaha, dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

5. RPJMD Kota Magelang Tahun 2005-2010

Dalam rentang periode lima tahun sebelumnya (RPJMD Kota Magelang Tahun 2005-2010) Pemerintah Kota Magelang telah berusaha semaksimal mungkin dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan daerah yakni Magelang sebagai Kota Jasa yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Pada era tersebut berbagai keberhasilan telah diraih, namun ada pula sebagian target pembangunan yang belum tercapai, diantaranya adalah terwujudnya pembangunan kembali Pasar Rejowinangun, tertanggulangnya kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kinerja otonomi daerah, kualitas pelayanan publik, dan lain sebagainya.

4.3. Analisa Faktor Internal dan Eksternal

1. Kekuatan (*Strength*)

- a. Letak Kota Magelang yang strategis di tengah Pulau Jawa dan Provinsi Jawa Tengah yang didukung jaringan transportasi dari berbagai arah.
- b. Sebagai Kota Pendidikan, memiliki lembaga pendidikan dan pelatihan yang cukup banyak, baik formal maupun informal.
- c. Sebagai Kota Militer, yang menunjang terciptanya stabilitas keamanan dan ketentraman.
- d. Sebagai Kota Jasa, dengan infrastruktur dan sarana prasarana yang sangat memadai.
- e. Citra positif yang dimiliki, ditunjukkan dengan posisi IPM, IPG, IDG, Indeks Daya Saing Investasi dan berbagai prestasi yang diraih seperti predikat Kota Cerdas Iptek, Anugerah Parahita, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan lain sebagainya.
- f. Hubungan kemasyarakatan yang harmonis antar berbagai golongan.
- g. Ketersediaan berbagai kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan dimensi-dimensi otonomi daerah.
- h. Sistem pengelolaan kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, permukiman dan lain-lain) yang berjalan dengan baik.

- i. Jumlah sumber daya aparatur dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Keterbatasan lahan dan sumber daya alam yang dimiliki.
- b. Lemahnya kemampuan keuangan daerah (Pendapatan Asli Daerah yang sangat kecil).
- c. Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, dibawah rata-rata Jawa Tengah.
- d. Rendahnya realisasi investasi dibanding dengan kebutuhan investasi.
- e. Kurangnya kerjasama ekonomi dengan daerah lain.
- f. Kurangnya jaringan usaha dan kemitraan usaha.
- g. Angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi (masuk dalam kelompok buruk di Jawa Tengah).
- h. Lemahnya prestasi di bidang pemuda, olahraga, seni dan budaya.
- i. Lemahnya koordinasi antar institusi pemerintah maupun non pemerintah.
- j. Lemahnya manajemen data, statistik dan analisa untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3. Peluang (*Opportunity*)

- a. Penyerahan berbagai urusan pemerintahan dari Pusat kepada Daerah, harus diikuti dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah.
- b. Pencitraan terhadap kualitas pelayanan publik.
- c. Masih terbukanya potensi usaha yang belum digarap.
- d. Masih terbukanya potensi pendapatan daerah dari pengembangan pelayanan jasa dan pemanfaatan sumber daya alam sarana dan prasarana seperti retribusi parkir, pengambilan air bawah tanah, penyebaran jalur angkutan umum, sub terminal dan lain-lain.
- e. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana publik.
- f. Penciptaan pusat-pusat kegiatan baru (area GOR Samapta, Taman Kyai Langgeng, Sidotopo, Sukarno-Hatta dan lain-lain).
- g. Berkembangnya partisipasi swasta/masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan jasa.
- h. Adanya potensi pengembangan kemitraan usaha antara koperasidan UMKM dengan pengusaha besar/BUMN/BUMD.
- i. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai hal.
- j. Meningkatnya budaya kreatif dan inovatif masyarakat.

4. Ancaman (*Threat*)

- a. Krisis ekonomi, meningkatnya jumlah penduduk sangat miskin dan menurunnya daya beli masyarakat.
- b. Inmigrasi tenaga kerja yang menggeser peluang kesempatan kerja tenaga kerja setempat.
- c. Menurunnya indikator derajat kesehatan masyarakat, transisi pola penyakit dan KLB (endemi).
- d. Degradasi kualitas lingkungan hidup dan peningkatan resiko bencana.
- e. Berkurangnya/kelangkaan sumber daya energi.
- f. Alih fungsi lahan, berkurangnya ruang terbuka hijau dan pembangunan yang tidak terkendali.
- g. Penyerapan teknologi pertanian
- h. Besarnya pengaruh negatif dari luar yang mengganggu tatanan norma, nilai dan budaya serta perilaku hidup masyarakat.
- i. Hilangnya kebanggaan atas seni budaya dan kecintaan terhadap hasil karya bangsa sendiri.
- j. Ketidakpuasan masyarakat melahirkan protes, anarkisme dan apatisme.
- k. Dinamika politik yang lebih mengutamakan kelompok tertentu.
- l. Terorisme, kriminalitas serta penistaan perempuan dan anak.
- m. Munculnya peraturan-peraturan yang tidak sinkron satu sama lain, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum di daerah dan kebingungan dalam implementasi.

4.4. Isu Strategis

Berdasarkan kajian dan uraian modal dasar, permasalahan, dinamika lingkungan strategis, dan analisa eksternal internal tersebut di atas dapat diidentifikasi isu-isu strategis pembangunan Kota Magelang. Perlu diutarakan bahwa pemilihan isu strategis mempertimbangkan beberapa hal, yakni:

- a. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Magelang;
- b. Besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik;
- c. Tingkat kemungkinan/kemudahan penanganan;
- d. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan;
- e. Memiliki daya ungkit terhadap pencapaian untuk pembangunan daerah;
- f. Janji politik yang harus diwujudkan.

Isu Strategis yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Magelang untuk ditangani dalam kurun waktu 2011-2015 adalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Upaya untuk memperbaiki tata pemerintahan dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban).

- Dalam sistem perencanaan, kebijakan harus sinergis sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan, terukur, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Dalam hal kelembagaan, organisasi pemerintah daerah dibentuk secara ramping namun mampu mencakup keseluruhan urusan/kepentingan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, jelas, tidak tumpang tindih dan memungkinkan kemudahan akses pelayanan terhadap publik.
- Penanganan berbagai permasalahan pemerintahan dan pembangunan yang sangat kompleks membutuhkan penempatan aparatur yang sesuai baik secara kualitas kompetensi maupun kuantitasnya. Pembinaan terhadap aparatur mesti terus dilakukan agar mampu menyikapi dinamika yang terjadi, responsif dengan dedikasi dan integritas yang tinggi untuk semata-mata kepentingan umum. Selain itu, pembangunan juga membutuhkan aparatur dengan daya inisiasi dan inovasi yang baik untuk dapat mengejar ketertinggalan dan mengatasi keterpurukan atas kemiskinan dan instabilitas yang terjadi.
- Kelemahan SKPD dalam pelaporan dan pertanggungjawaban biasanya terletak dalam kemampuan penyediaan data, analisa dan model laporan yang tidak simpel. Kesadaran akan pentingnya data yang lengkap dan akurat hingga kearsipan sebagai dokumen pembuktian harus ditingkatkan. Sistem manual harus segera dirubah dengan sistem komputer, sehingga lebih efisien, cepat dan mudah dalam operasionalnya.

b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.

Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya

pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

c. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sebagian dari amanat Otonomi Daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah harus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. Peningkatan pendapatan daerah diupayakan melalui intensifikasi pemungutan pajak/retribusi, penggalian potensi pendapatan dan perwujudan realisasi investasi, namun tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

d. Perhatian terhadap investasi sektor riil

Belum mantapnya kondisi perekonomian daerah, ditandai dengan rendahnya dukungan investasi swasta bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Tingkat pertumbuhan investasi yang tercermin dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) antara 3-4% merupakan angka yang rendah untuk dapat mewujudkan pembangunan yang optimal. Investasi juga harus mempertimbangkan pemerataan pendapatan bagi masyarakat, artinya tidak boleh mengeksploitasi kekayaan/potensi masyarakat hanya untuk keuntungan sekelompok konglomerat. Contoh riil adalah merebaknya pasar modern yang tidak terkendali dikhawatirkan akan menggeser kelangsungan hidup pasar tradisional ataupun pertokoan/ warung masyarakat.

Sebagai kota jasa dengan profesi penduduk terbesar sebagai pedagang dan buruh, maka sarana dan prasarana sektor perdagangan dan industri kecil mesti diperhatikan. Pembangunan Pasar Tradisional Rejowinangun menjadi janji politik yang harus segera diwujudkan, termasuk pula menjadikan area sekitarnya senantiasa hidup dalam 24 jam setiap harinya.

e. Kemiskinan

Kemiskinan terjadi karena rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat. Pendapatan perkapita penduduk Kota Magelang yang berada pada kisaran 13 juta rupiah (harga berlaku) atau 8 juta rupiah (harga konstan), dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar 5 %, laju inflasi 7,66% dan Indeks Harga Konsumen 9,5% sangat memungkinkan terjadinya penurunan terus menerus daya beli masyarakat. Langkah prefentif dalam bentuk pemberdayaan dan langkah kuratif dalam bentuk jaminan sosial atas kebutuhan dasar mesti dilakukan.

f. Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka yang terus meningkat selain disebabkan oleh dampak berkepanjangan krisis ekonomi dan bencana alam, juga disebabkan oleh rendahnya kualitas angkatan kerja yang tidak mampu bersaing dan tidak mampu menciptakan lapangan kerja mandiri. Peluang usaha pada prinsipnya masih lebar, dibutuhkan kemampuan dan fasilitasi untuk dapat merealisasikannya.

Lapangan kerja yang akan terus bertahan adalah yang memiliki pangsa pasar yang besar dan memiliki daya saing produk, maka penerapan iptek dalam produksi dan bisnis serta peningkatan hubungan antara produsen lokal dengan pasar yang luas harus menjadi perhatian.

g. Pendidikan untuk kemajuan dan moralitas

Pendidikan memiliki dua mata pisau, di satu sisi berorientasi pada kecerdasan iptek guna kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan jasmaniah, dan di sisi lain berorientasi pada kecerdasan emosional dan spiritual guna kedamaian hidup, solidaritas dan kepedulian sosial. Penunjang sisi yang pertama adalah adanya kesempatan dalam memperoleh pendidikan, sarana dan prasarana yang memadai, serta tenaga kependidikan yang berkualitas. Kesempatan yang sama tersebut berlaku baik laki-laki-perempuan, tua-muda, kaya maupun miskin, yang artinya bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Wajib belajar 12 tahun di Kota Magelang, Bantuan Operasional Sekolah, pembangunan gedung dan prasarana lainnya, merupakan contoh riil perhatian pemerintah terhadap pendidikan. Agar pendidikan bisa bermanfaat, kurikulum pendidikan juga harus mempertimbangkan kebutuhan dunia usaha dan spesifikasi potensi setiap pelaku/siswa.

Penunjang sisi yang kedua adalah pembentukan karakter manusia yang berbudi, agar mampu memilih yang baik, menghindari/mencegah perilaku yang salah.

h. Pelayanan Kesehatan

Sebagian target indikator kinerja SPM Kesehatan belum tercapai. Angka kematian bayi dan balita, status Gizi masyarakat, endemi Demam Berdarah, Flu Burung dan Chikungunya, angka kesakitan dan kematian diabetes militus,

kardiovaskuler dan keganasan (kanker), kebiasaan merokok serta pola hidup tidak sehat lainnya menjadi sebagian dari masalah yang harus ditangani.

Kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi, jaminan pelayanan kesehatan yang memuaskan bagi semua warga negara. Subsidi silang pun harus disadari oleh semua pengguna layanan kesehatan bahwa tanggung jawab pembangunan tidak hanya pada pemerintah, tetapi seluruh komponen masyarakat/swasta sesuai dengan kemampuannya.

i. Ancaman kerusakan lingkungan, permukiman tak sehat, bencana alam dan penanganan pengungsi.

Menurunnya daya dukung lingkungan, kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya alam adalah akibat dari kurang terkendalinya para pelaku pembangunan (pemerintah, masyarakat maupun swasta) dalam pemanfaatan, penataan serta perhatiannya terhadap dampak yang ditimbulkan. Kesalahan dalam tata guna lahan, bangunan, rumah tidak layak huni, lingkungan permukiman kumuh utamanya pada kawasan padat, penghijauan dan resapan air ke tanah serta penertiban perizinan perlu makin diperhatikan.

Dampak dari kesalahan tersebut adalah meningkatnya potensi kerusakan lingkungan dan bencana alam seperti kebakaran multi rumah, banjir karena luapan air selokan/air hujan, longsor dan sebagainya. Kesiagaan Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam (Satkorlak PBA) berikut personel dan sarana-prasarananya makin dibutuhkan.

Meningkatnya kepadatan lalu lintas selain meningkatkan polusi udara juga meningkatkan resiko kecelakaan, sehingga pengembangan/pendayagunaan jalur-jalur alternatif dan rambu-rambu makin diperlukan.

Setiap jengkal tanah diupayakan untuk dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh pemiliknya menjadi lahan yang produktif.

j. Kebudayaan, pariwisata, olahraga dan pemuda

Kesenian, tradisi, pariwisata, olahraga dan pemuda jika dapat berkembang dengan baik akan merupakan potensi yang dapat dieksploitasi profitabilitas maupun benefiditasnya. Evolusi budaya berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pewarisan seni tradisi (*transfer knowledge*). Sebagai kebanggaan atas warisan leluhur, kecintaan terhadap tanah air (*local genius*), maka rantai yang hilang dalam setiap generasi pewarisan seharusnya diminimalisir. Daya tarik pariwisata terdapat pada sisi keunikan/kekhasan, keunggulan budaya, dan

pelayanan dengan sarana dan fasilitas yang memadai. Daya dukung sektor ini juga terdapat pada kepemudaan yang berkualitas, berprestasi, peduli, kreatif dan inovatif dalam mengambil setiap peluang/kesempatan positif yang ada.

k. Stabilitas daerah.

Terpeliharanya stabilitas daerah dalam suasana yang kondusif menjadi prasyarat bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pelayanan publik di daerah. Di Kota Magelang potensi gangguan keamanan dan ketertiban muncul apabila terjadi konflik antara buruh dan majikan dalam pengelolaan manajemen perusahaan; perilaku tidak tertib kalangan sektor informal kaki lima, gelandangan dan pengemis (gepeng); unjuk rasa; perkelahian antar kelompok dan tawuran; serta berbagai bentuk pelanggaran dan ketidakdisiplinan lainnya. Adanya kerawanan dan masalah sosial akan berdampak negatif dan berpotensi melahirkan berbagai penyakit masyarakat seperti, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, perjudian, pelacuran, dan premanisme. Selain itu, tidak boleh dilupakan juga terhadap ancaman bahaya terorisme, konflik yang bersifat SARA, dan gerakan radikalisme yang acapkali bersifat laten serta memiliki spektrum jaringan dan daya destruktif yang lebih luas.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, memudar dan lunturnya nilai-nilai wawasan kebangsaan serta rendahnya kesadaran politik warga pada gilirannya dapat memunculkan sikap dan tindakan yang hanya bersemangatkan solidaritas sempit, ikatan primordial, dan sektarian dari satu kelompok masyarakat tertentu yang bisa mengakibatkan retaknya keharmonisan, keserasian, dan integrasi antar warga dalam jalinan interaksi sosial. Di sisi lain, maraknya perilaku KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang menggerogoti kekayaan negara mencerminkan pula terjadinya erosi dan menipisnya rasa cinta air dari para pelakunya. Degradasi dan krisis terhadap nilai-nilai nasionalisme dan spirit kebangsaan harus dieliminasi atau setidaknya direduksi melalui perkuatan persatuan dan kesatuan bangsa serta penanaman nilai-nilai luhur bangsa yang bersendikan ideologi Pancasila dan UUD 1945 secara substantif dalam praksis sehari-hari, yang disertai dengan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.